



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24  
TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Konsentrasi Hukum Tata Negara



**OLEH:**

**JUNAIDI**  
**NIM. 11627104266**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **"Efektivitas Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik"** yang ditulis oleh:

Nama : JUNAIDI  
 NIM : 11627104266  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

**MHD. KASTULANI, SH., MH.**  
 NIP. 19630909 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

kepos dengan judul *"EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA PEMANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK"* yang ditulis oleh :

Nama : **JUNAIDI**  
 NIM : 11627104266  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Jon Alizon, SH., M.H**

Penguji II  
**Syahrinaldi SH., MA**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI  
NIM : 11627104266  
Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 22 Januari 1998  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ *EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK*” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

**JUNAIDI**

**NIM. 11627104266**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Online single submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas Nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan lambatnya proses pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Penulis ini dilakukan di Kelurahan Kecamatan tebing tinggi Kabupaten kepulauan meranti Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga di Kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk menganalisa faktor apa yang menjadi hambatan pelaksanaan efektivitas Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas DPMPTSPDTK, Kasubag Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Pelayanan Perizinan serta masyarakat penggunaan OSS. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa Efektivitas Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten kepulauan Meranti belum efektif karna beberapa hambatan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. Atas ridho-Nya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tentang **“EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK”**. dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini merupakan suatu kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan dan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang tidak sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengarapkan kritik dan saran yang membangun untuk





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Mohd Ali Ahmad Dan Ibunda Nurhayati, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa dan selalu berdoa untuk kesehatan, kesuksesan dan memberikan dorongan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno , M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Ibu Nuraini Sahu, Hj. S.H, MH selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak H. Kastulani, S.H, MH selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum. Saudari Ikroh Bania, S.IP yang telah ikut serta memberi motivasi dan referensi kepada saya selama proses pembuatan skripsi ini

Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2016, IH D, serta seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua peran kalian dalam membantu penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 01 januari 2021

Penulis

**JUNAIDI**  
**11627104266**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	19
B. Sejarah Kecamatan Tebing Tinggi .....	20
C. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Meranti .....	28
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Sistem Informasi Manajemen .....	35
B. Pelayanan Publik .....	41
C. Efektivitas .....	46
D. Praturan Daerah .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Sigle Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .....	52



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Online Sigle Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .....	62
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Populasi Dan Sampel .....	15
tabel II.1	.....	20
Tabel II.2:	Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	22
Tabel II.3:	Jarak Antara Kota Selatpanjang Dengan Kelurahan Di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.....	23
Tabel II.4	Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2021 .....	24
Tabel II.5:	Jumlah Pekerja Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti. .	26
Tabel III.1	Efektivitas Penerapan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti	51
Table IV.1	Pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat Responden Dan Perunsur Pelayanan .....	61





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Latar Belakang Masalah

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami membuat masyarakat memiliki posisi tawar yang ketika berhadapan dengan penyelenggaraan publik. Selain itu masih tingginya korupsi kolusi dan nepotisme (kkn) yang terjadi menyebabkan biaya pelayanan publik juga menjadi permasalahan publik juga menjadi permasalahan publik yang sering terjadi.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum efektif dan efisien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang ke suatu instansi pemerintah tertentu. Kehadiran dinas penanaman modal atau investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat lain.<sup>1</sup> dalam program pembangunan nasional yang menjadi arah kebijaksanaan penanaman modal dimungkinkan pelaksanaannya dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu.<sup>2</sup> Hal ini tentunya membuat pelayanan yang mengandalkan tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari satu kali ketika syarat dan prosedur belum lengkap.

<sup>1</sup> Aminuddin Limar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Karisma Utama, 2006), hlm.4

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1970), hlm.1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan akan proses yang cepat bagi setiap pengusaha merupakan satu keniscayaan, sementara aparat birokrasi memiliki sejumlah kewenangan untuk mengatur dan menentukan aktivitas bisnis yang ada di wilayahnya, akibatnya mereka, bertemu dalam kesepakatan jahat layaknya teori permintaan dan penawaran yang sangat menentukan besaran biaya dan harga dari suatu produk dan perizinan. Tentu saja, biaya yang dikeluarkan pengusaha akan semakin besar ketika prosedur pengurusan izin semakin panjang dan banyak melibatkan instansi ataupun pejabat birokrasi.<sup>3</sup>

Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.<sup>4</sup>

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azas pemerintah yang demokratis. Peranan pemerintah ini menuntut agar pemerintah (birokrasi) memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntutan pemerintah yang baik (good

<sup>3</sup> Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm.12

<sup>4</sup> Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, (Makassar: CV Sah Media, 2019), hlm.141-

governance). Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat dewasa ini adalah pelayanan publik di bidang administrasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya.

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Di kabupaten kepulauan meranti kantor yang mengurus tentang perizinan adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSPDPTK). Pembentukan dan kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti yaitu upaya mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan kabupaten kepulauan meranti sebenarnya baru saja diterbitkan dan diterapkan pada tahun 2018 tentang perizinan online single submission (OSS).

Kondisi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan selama ini sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem dan prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit belit, lama dan tidak ada limit waktu, mahal dan syarat akan nuansa KKN serta pungli. Buruknya kondisi ini berdampak dengan terganggunya iklim dan investasi serta aktivitas kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat di kabupaten kepulauan meranti khususnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik yang berisi kriteria- kriteria pelayan prima yaitu; kesederhanaan, kelesan, kepastian pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan.<sup>5</sup>

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah yang tidak mungkin dapat di hindari karena sudah merupakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terhadap masalah- masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala internal yaitu yang berasal dalam instansi itu sendiri maupun kendala eksternal yakni kendala dari pelaku usaha pengguna jasa dalam kaitannya pelayanan yang di tangannya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada pelaku usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk menangani masalah- masalah yang di hadapi di atas, maka di keluarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan pedoman yang mengatur pokok- pokok dan tata cara membangun sistem penanaman modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntabel, transparan, demokratis, efesien, dan efektif serta sederhana.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<sup>6</sup> Peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 2-3-11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 2, peraturan menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Memberikan akses yang lebih luas pada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Sedangkan di pasal 3, sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;

Sedangkan Dalam pasal 11, proses waktu dan biaya penyelenggaraan pelayanan;

jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan di tetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai dari sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga digunakan secara *interchangeable*.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>8</sup> Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja

tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.<sup>9</sup>

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

<sup>7</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1

<sup>8</sup> Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, ( vol 17 no 6, 2011), hlm.708

<sup>9</sup> Sendjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hlm.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yaitu:

(1) Perangkat system OSS meliputi;

- a. Perangkat keras;
- b. Perangkat lunak;
- c. Jaringan;
- d. Perangkat pendukung;

(2) Perangkat sistem OSS sebagaimana di maksud pada (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, hal ini juga di sebabkan juga karena penambahan kewenangan izin yang di urus oleh (DPMPTSPDTK) kabupaten kepulauan meranti telah memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini di sebabkan juga karena penambahan kewenangan izin yang di urus oleh (DPMPTSPDTK) kabupaten kepulauan meranti ternyata tidak di imbangi kesiapan pegawai.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Pasal 92

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan yang berbasis E-Government dengan menyediakan informasi dan pelayanan yang lebih lengkap dan memudahkan masyarakat dalam hal mengurus perizinan mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap penerbitan dokumen, melalui online single submission (OSS).<sup>11</sup> pelayanan berbasis sistem online ini di hadirkan sebagai bentuk pelayanan Prima kepada masyarakat yang melakukan permohonan perizinan di kabupaten kepulauan meranti.

Online single submission (OSS) merupakan aplikasi yang di gunakan untuk segala proses registras dan pengajuan perijinan lainnya yang termasuk dalam layanan perijinan berusaha menurut peraturan pemerintah no 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan alamat <http://oss.go.id>. OSS di luncurkan pemerintah pusat pada 26 oktober 2018 dan wujudkan 26 oktober 2018 di dinas penanaman modal dan tenaga kerja pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kepulauan meranti. Sistem oss terintegrasi dan menjadi gerbang dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Sistem OSS ini menjadi acuan utama (single reference) dalam perizinan berusaha. Dalam hal kementrian, lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari satu sistem perizinan elektronik yang di tentukan oleh kementrian, lembaga, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Setelah berapa bulan berjalan penerapannya masih banyak yang harus di bahasi, seperti belum maksimalnya sarana dan prasarana yang di miliki seperti

---

<sup>11</sup> Wulan Purnama Sari Dan Lidya Irena, *Kumunikasi Komputer Dan Masyarakat*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2019), hlm.133

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan internet yang lambat ketika listrik padam maka jaringan internet padam juga serta kurang kemampuan suber daya manusia dalam penerapan aplikasi OSS dan tidak mengetahui pengguna OSS. di akui bahwa saat ini perizinan secara elektronik yang telah di terapkan oleh (DPMPTSPDPTK) kabupaten meranti, ini belum di ketahui atau di pahami secara baik oleh masyarakat.

Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, karena adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia Dari peraturan lama ke peraturan baru, masalah pembenahan perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (homework) yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, karena adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia.<sup>12</sup>

Dari peraturan lama ke peraturan baru, masalah pembenahan perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (*homework*) yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, karena adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> K. Harjono Daniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ( Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perizinan yang beralih kedalam sistem online saat ini telah diterapkan dan telah dilaksanakan, akan tetapi timbul permasalahan-permasalahan baru dan tantangan yang muncul yaitu:

1. Integrasi sistem yang masih kurang. Selama ini, di beberapa daerah masih kesulitan mengintegrasikan OSS dengan sistem sebagus yang dimiliki Kemenkominfo sebagai sistem pusat.
2. Database perizinan dalam OSS juga belum terklasifikasi secara jelas. Akibatnya, Pemerintah Daerah harus memasukkan data secara manual yang menyebabkan proses pengeluaran sebuah izin memakan waktu yang lama.
3. Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTD).
4. Masih memiliki sejumlah kendala baik di tingkat pusat maupun daerah dari sisi tata yang di laksana. Dari tingkat pusat, OSS belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan kementerian dan lembaga. Sementara itu, di daerah masih banyak pemda yang masih lebih mengandalkan sistem perizinan daerah mandiri berbasis aplikasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERMINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK”

### Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
2. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di teliti, maka tujuan dan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
- b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Dalam Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

#### 2. Manfaat penelitian

Berkenan dengan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka mendalami ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Di samping itu juga dari penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam hal penelitian yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten kepulauan meranti untuk terus memperbaiki khusus pelayanan publik kepada pelaku usaha dan dengan harapan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publiknya kearah yang lebih baik di masa mendatang dan juga bagi para aparatur pemerintah pada dinas penanaman pelayanan terpadu satu pintudan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian ini di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu penomena, sehingga bias menghasilkan pengetahuan baru.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis dan penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengadakan indetifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data premier dan data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif yaitu megambarkan secara tepat sifat suatu indivindu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

##### 2. Lokasi penelitian





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Lapangan Yang Di Laksanakan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPDTK) Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 3. Subjek dan objek penelitian

Subjek Penelitian Ini Adalah Skretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Sedangkan Yang Menjadi Objek Dalam Penelitian Ini Adalalah Efektivitas Penerapan Online Single Submission Orang Yang Ingin Mendaftar Untuk Membuat Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat ciri yang sama.<sup>14</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *purposive sampling*, yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

<sup>14</sup> Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 121

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	%	Keterangan
1	Skretaris	1	1	100%	Wawancara
2	Kasubag Umum	1	1	100%	Wawancara
3	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	100%	Wawancara
4	Kasi Pelayanan Perizinan	3	3	100%	Wawancara
5	Masyarakat	45	5	11%	Wawancara
	Jumlah	51	11		

## 5. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

### a. Data primer

Adalah data yang di peroleh langsung di lapangan melalui wawancara. Pengumpulan data ini di lakukan untuk menemukan data yang akurat mengenai pelaksanaan PP. NO 24 TAHUN 2018 efektivitas penerapan online single submission.

### b. Data sekunder

Adalah data peneliti ini di peroleh secara tidak langsung. Karna peneliti memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang di lakukan terhadap banyak buku dan data-data yang di peroleh dari tempat penelitian yang di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja di kabupaten kepulauan meranti. buku. Jurnal dan lain-lain.

#### 6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan.
- c. Studi kepustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

#### 7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada.

#### 8 Teknik Penarikan Kesimpulan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memuat:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti
- B. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Tebing Tinggi
- C. Kondisi fisik dasar wilayah
- D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Sistem informasi manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Pelayanan publik
- C. Teori efektivitas
- D. Peraturan Daerah

### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data

yang telah di peroleh :

- A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
- B. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

### BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu Bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan didalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Sebagai kabupaten pemekaran tentunya menjadi harapan bagi masyarakat bahwa pemerintah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemanfaatan potensi daerah. Pembangunan tentunya harus didasarkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat, sedangkan pemanfaatan potensi daerah sangat perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang kemandirian suatu daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga pulau utama (besar) yaitu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yaitu Pulau Merbau, Topang, Burung, Panjang, Menggung, Setahun, dan Berembang. Seperti dalam pada tabel II.1 dibawah ini:

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	JUMLA DESA
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	14
3	Merbau	Teluk Belitung	10
4	Rangsang	Tanjung Samak	14
5	Rangsang Barat	Bantar	12
6	Pulau Merbau	Kuala Merbau	11
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	10
8	Rangsang Pesisir	Telesung	11
9	Tasik Putri Puyuh	Bandul	10

Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada coordinator antara sekitar 0 0 420 300 -1 0 280 0 0 LU, dan 1020 120 0 0 –1030 100 0 BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia –Malaysia –Singapore (IMS-G) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam –Tanjung Balai Karimun.

**B. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Tebing Tinggi**

1. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi,

Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ibukota Selatpanjang. Kabupaten

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia -Malaysia -Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam -Tj. Balai Karimun.

Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu 2 ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti: 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Sebatpanjang adalah 45,44 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009.



Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9

Kecamatan dan 101 desa/Kelurahan, yaitu :

Tabel II.2: Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	849.50
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586.83
3	Merbau	Teluk Belitung	681.00
4	Rangsang	Tanjung Samak	241.60
5	Rangsang Barat	Bantar	1.348.91
6	Pulau Merbau	Kuala Merbau	765.987
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804.06
8	Rangsang Pesisir	Sonde	847.540
9	Tasik Putri Puyuh	Bandul	761.87

Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021

Dari table diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meratni sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Dan jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

Sementara itu, letak lokasi penelitian berada pada Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Meranti memiliki jarak antara Ibukota dengan kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi hal ini dapat dilihat pada tabel.

**Hak Cipta Ditilindungi Undang-Undang**

Tabel II.3: Jarak Antara Kota Selatpanjang Dengan Kelurahan Di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021

No	Kelurahan	Jarak Lurus (Km)
1	Selatpanjang Kota	1
2	Selatpanjang Barat	3
3	Selatpanjang Timur	4
4	Selatpanjang Selatan	11
5	Sesap	20
6	Banglas Barat	9
7	Banglas	7
8	Alah Air	12
9	Alah Air Timur	16

Sumber: Kantor Camat Tebing Tinggi, 2021

Lokasi penelitian posisinya terletak di Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi yang jarak lurusnya 4 kmdari Ibukota Kecamatan.

## 2. Kondisi Fisik Dasar Wilayah

### a. Topografi

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol). Keadaan Penduduk

Penduduk disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki masing-masing tingkat kepadatan yang berbeda-beda. dari total keseluruhan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 bahwa Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Meranti yang memiliki persentase dan kepadatan penduduk tinggi.

Dengan Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 56.192 jiwa dengan jumlah 9 Desa/ Kelurahan. Sementara penduduk dengan kepadatan terendah di Kabupaten Meranti adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yakni sebesar 11.733 jiwa. Untuk melihat keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Meranti dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel II.4 Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

No	Kecamatan	Jumlah peduduk (jiwa)
1	Tebing Tinggi	15.809
2	Tebing Tinggi Barat	56.192
3	Merbau	11.733
4	Rangsang	18.253
5	Rangsang Barat	26.971
6	Pulau Merbau	17.448
7	Tebing Tinggi Timur	14.174
8	Rangsang Pesisir	14.975
9	Tasik Putri Puyuh	16.327

Sumber : kantor camat tebing tinggi 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, semangkin maju pendidikan, semangkin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karna itu pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat hendaknya memberi perhatian yang lebih besar pada bidang pendidikan.

#### c. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Serta untuk dibidang pertenakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk di pertenakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ketenagakerjaan

Sektor Industri dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Meranti ternyata juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Bila kita melihat tabel 4.4 dibawah bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di sektor industri berjumlah 5.178 jiwa. Berikut adalah data yang dikeluarkan dari BPS Kabupaten Meranti.

No	Kecamatan	Jumlah pekerja (jiwa)
1	Tebing Tinggi	927
2	Tebing Tinggi Barat	519
3	Merbau	906
4	Rangsang	865
5	Rangsang Barat	156
6	Pulau Merbau	232
7	Tebing Tinggi Timur	498
8	Rangsang Pesisir	277
9	Tasik Putri Puyuh	798
	Jumlah	5.178

Tabel II.5: Jumlah Pekerja Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021

e. Agama dan Keyakinan

Kehidupan umat beragama dapat berdampingan dengan harmonis sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai rumah ibadah masing-masing agama tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya hingga sampai hari ini. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti.

Salah satunya selarasnya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Kongchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 1 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa.

#### f. Gambaran Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

Usaha Industri Sagu adalah merupakan usaha dalam bidang industri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti. Kecamatan Tebing Tinggi sendiri memiliki 49 usaha Industri Sagu dengan jumlah 343 orang tenaga kerja. Dengan jumlah usaha industri dan tenaga kerja tersebut peranan industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Meranti. Dalam hal penyerapan tenaga kerja dalam bidang industri di Kecamatan Tebing Tinggi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Meranti yang bekerja di sektor industri berjumlah 519 jiwa, ini menunjukkan bahwa industri di Kecamatan Tebing Tinggi juga turut menyumbang dalam hal penyerapan tenaga kerja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti.

Tugasnya:

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Tugas utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah merencanakan, mengembangkan iklim dan promosi penanaman modal, memantau, melakukan pembinaan, serta melaksanakan penanaman modal.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengemabangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data dan informasi.

2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kepulauan Meranti:

a. kepala:

b. sekretariat terdiri dari:

1. sub bagian umum, kepegawaian dan program;
2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
3. bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, terdiri dari:

1. seksi perencanaan penanaman modal;
2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
3. seksi promosi penanaman modal.

c. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi:

1. seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
3. seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.

d. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, terdiri dari:

1. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I;





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. seksi pelayanan perizinandan nonperizinan II; dan
3. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III.
- e. bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan, terdiri dari:
  1. seksi pengaduan dan informasi layanan;
  2. seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
  3. seksi pelaporan dan peningkatan layanan.
- f. bidang tenaga kerja, terdiri dari:
  1. seksi 1
  2. seksi 2
  3. seksi 3
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. unit pelaksana teknis dinas

visi dan misi dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja

Visi:

2. Terwujudnya investasi dan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah dan transparan.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat, mudah dan transparan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menciptakan peluang dan potensi investasi daerah menjadi potensi unggulan berdasarka sumber daya lokal yang ramah lingkungan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta menciptakan lapangan kerja

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tugas:

dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data informasi.
2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

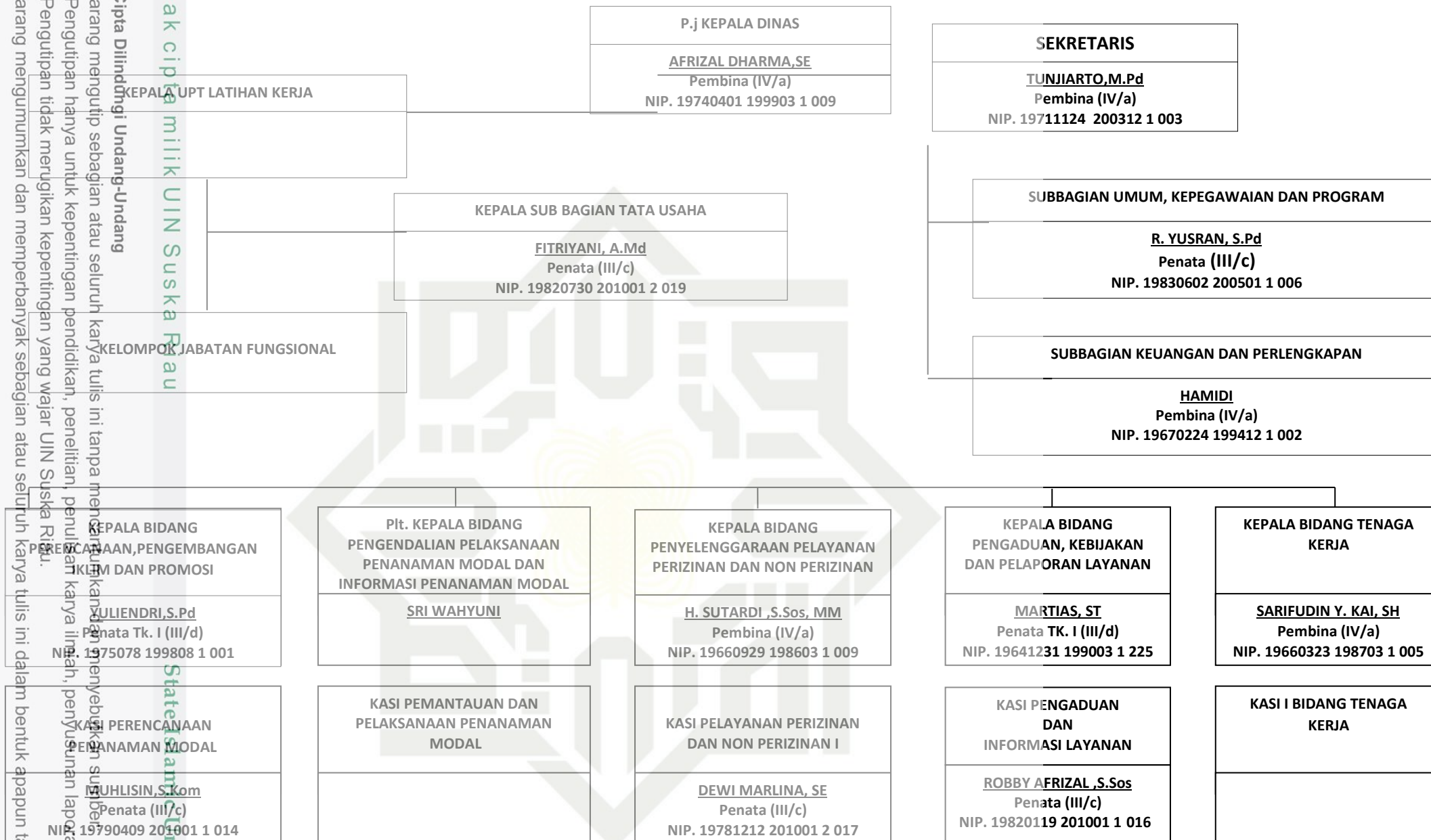




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, dan publikasi;
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Riau

KASIPENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<u>ATI NURHAYATI, S.Sos</u> Penata Tk. I (III/b) NIP. 19810202 201407 2 007
KASIPROGRES PENANAMAN MODAL	<u>RIKAURNAMASARI, SE</u> Penata (III/C) NIP. 19860418 201102 2 002
JABATAN FUNGSIONAL	

KASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
KASI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<u>EVY NUTYLA, S.IP</u> Penata (III/c) NIP. 19720824 199403 2 001
JABATAN FUNGSIONAL	

KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II	<u>KATIRUN, S.Pd</u> Pembina (IV/a) NIP. 19671231 198908 1 002
KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III	
TIM TEKNIS	

KASI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN	<u>MAILEFNI, SE</u> Penata (III/c) NIP. 19760520 201001 2 010
KASI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	<u>RIKA CAHYATI, SE</u> Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19840106 201001 2 028
JABATAN FUNGSIONAL	

Pj. KASI 2 BIDANG TENAGA KERJA	<u>SISKA PRIMA SARI, SH</u> Penata (III/c) NIP. 198412 07 201102 2 002
KASI 3 BIDANG TENAGA KERJA	<u>IBRAHIM</u> Pembina (IV/a) NIP. 19690603 199403 1 004
JABATAN FUNGSIONAL	



## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai banyak pengertian yang salah satunya bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem manusia atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, dengan demikian sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah data base.<sup>15</sup> sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya.<sup>16</sup>

sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. sistem informasi manajemen adalah

<sup>15</sup> Setya Raharja, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: UNY Press 2006), hlm.36

<sup>16</sup> Azhar Sutanto, *System Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, (Bandung: Lingga Jaya 2002), hlm.40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa.<sup>17</sup>

Sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sekumpulan sub Sistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk suatu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.<sup>18</sup> sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan makna istilahnya, sistem informasi manajemen harus ditinjau dengan pendekatan sistem, ini berarti bahwa manajemen itu sendiri dimana proses informasi berlangsung harus dilihat sebagai sistem, dalam hal ini sebagai total sistem. Dengan manajemen sebagai total sistem, maka sistem informasi manajemen merupakan salah satu sub sistem dari sekian banyak sub sistem yang

<sup>17</sup> Mc.Loed, Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat 2008), hlm.46

<sup>18</sup> Edhy Sutanta, *Sistem Informasi Manajemen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2003), hlm.28

<sup>19</sup> Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm.16

tercakup oleh total sistem tersebut. Jadi pada dasarnya sebuah sistem informasi manajemen adalah menerima dan memproses data untuk kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna informasi dalam lingkungan manajemen.

dalam buku prinsip-prinsip sistem informasi manajemen makasifat sistem informasi manajemen dapat digaris bawahi sebagai berikut<sup>20</sup>:

a. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Menyeluruh

Kata manajemen dalam SIM adalah serba melingkupi. Di dalam SIM termasuk sistem pemproses transaksi dan sistem-sistem yang utama dirancang para manajer dibeberapa tingkatan. Sebuah SIM melingkupi sistem informasi formal maupun informal, baikpun yang manual maupun yang berkomputer, termasuk juga sistem informasi proyek, sistem informasi perkantoran, sistem informasi intelejen, sistem informasi peramalan, sistem penopang keputusan dan berbagai model komputer memproses data bisnis, serta berbagai sistem informasi bisnis atau tersruktur. Sebagai penyeimbang, mungkin komponen yang terpenting dalam sistem informasi manajemen adalah manajer, yang pikirannya akan memproses dan menyebarluaskan informasi serta berinteraksi dengan elemen-elemen lain dari Sistem Informasi Manajemen.

b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Terkoordinasi

<sup>20</sup> Achmad Nashir Budiman, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm.100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen sebuah SIM biasanya tidak dikelolakan dari titik pusat organisasi, ada berbagai departemen pengguna, departemen pemroses data, dan mungkin fungsi pengelola data yang terpisah, bahkan yang lain-lainnya mungkin memiliki hak atas bagian tertentu dari sistem informasi manajemen. Bagaimanapun juga, sebuah sistem informasi manajemen dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses, otomatisasi perkantoran, maupun data intelejen dan juga komponen-komponen yang lainnya, dikembangkan dan dioperasikan dengan cara terencana dan terkoordinasi, semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju sub sistem yang diperlukan, serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien. Fungsi koordinasi ini terjadi biasanya dilakukan oleh komisi pengarah yang terpisah atau oleh bagian pengolahan data atau oleh manajer pengelola data.

#### c. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Memiliki Sub-sistem Informasi

Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub sistem atau sistem komponen setengah terpisah yang merupakan bagian dari keseluruhan dan merupakan sistem yang terpadu. Masing-masing dari sub sistem menyumbang tercapainya sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Sebagian dari sistem berperan hanya dalam kegiatan atau satu lapis organisasi saja, sementara yang lainnya berperan serba-lapis (multi-level) atau melaksanakan kegiatan berganda harus disusun secara cermat dan ditetapkan sebagai bagian dari rencana sistem jangka panjang.

#### d. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi Secara Rasional

Sub sistem (kumpulan dari sistem yang terpisah) adalah terpadu sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya, integrasi ini dilakukan terutama dengan melewati data diantara sistem-sistem tersebut. Program komputer dan file dapat dirancang untuk menangani arus data diantara sistem dan prosedur manual dapat digunakan untuk melaksanakan integrasi tersebut. Sementara integrasi membuat pemrosesan antara (intermediate processing) dan peristiwa pemrosesan data yang sama oleh berbagai departemen dan keuntungan yang menonjol adalah memberikan informasi lebih singkat, lengkap, dan releval. Manajer senior khususnya, akan dapat mengambil manfaat dari sistem integrasi karena mereka memerlukan informasi saling fungsional. Walau integrasi total dari sub-sistem tidak akan tercapai namun demikian sampai derajat tertentu integrasi diperlukan untuk suatu sistem informasi manajemen yang efektif.

#### e. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Mentransformasikan Data kedalam Informasi dengan berbagai cara

Apabila data diolah dan berguna bagi manajer tertentu untuk tujuan tertentu, maka ia menjadi informasi ada berbagai cara dimana data harus ditransformasikan kedalam sebuah sistem informasi. Misalnya biaya keseluruhan, biaya variabel, dan biaya standar untuk masing-masing organisasi, baik untuk masing-masing jenis biasa, jenis konsumen dan jalur produk. Berbagai cara dimana sisem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi manajemen harus mentransformasikan data kedalam sistem informasi diujukan dan pengharapan dari penerima eksternal atau informasi

f. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Meningkatkan Produktivitas

Sistem informasi manajemen (SIM) dengan berbagai cara mampu meningkatkan produktivitas. SIM mampu melaksanakan tugas rutin seperti penyimpanan dokumen dengan efisien, ia mampu memberikan layanan terbaik bagi organisasi eksternal dan individu dan ia juga mampu memberikan peringatan dini tentang masalah internal dan ancaman eksternal, disamping juga mampu meningkatkan adanya berbagai kesempatan, membantu proses manajemen yang normal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi masalah-masalah tak terduga.

g. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sesuai dengan Sifat dan Gaya Manajer

Suatu sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya, termasuk juga sumbangan yang diberikan oleh para manajer. Pada tingkat senior dalam organisasi, secara cermat sistem informasi manajemen dijalin dengan rasa pribadi para manajer dan akan dijalin kembali dengan cita rasa masing-masing manajer baru apabila yang lama terheti. Pada lapis organisasi terendah, sistem informasi manajemen dengan cita rasa biasa dimana para tenaga kerja administrasi dan personil operasi akan menggunakan informasi dan berinteraksi dengan sistem informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



h. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Menggunakan Kriteria Mutu yang telah diterapkan

Sebuah sistem informasi manajemen baru dirancang agar sesuai dengan toleransi terhadap kecepatan, relevansi dan ketetapan informasi. Toleransi ini bervariasi dari satu tugas ketugas yang lainnya dan dari satu lapis ke lapis yang lainnya didalam organisasi. Terhadap kecepatan, untuk beberapa tugas tertentu data yang diperlukan harus dicari selama waktu yang panjang dan kemudian diransofrmasikan sehingga menjadi informasi yang diperlukan manajer baik secara periodis maupun ada waktu tak teratur, sedangkan untuk tugas lain mungkin diperlukan dengan selang waktu teratur, tetapi karena panjangnya periode tunda memungkinkan untuk dilaporkan setelah selesainya suatu periode. Untuk tugasnya yang lain lagi, mungkin informasi diperlukan secepat mungkin segera selesai berakhirnya periode dan untuk kebanyakan tugas informasi harus diperoleh selama periode berlangsungnya transaksi.

### B. Pelayanan Publik

Istilah Publik berasal dari bahasa inggris yaitu public yang berarti yang paling umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti umum, orang banyak, ramai Yang kemudian pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar jenis-jenis pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kelompok pelayanan administratif. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda

---

<sup>21</sup> Badudu, J.S dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rineka Cipta 2001), hlm.1031

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk (KTP), akta pernikahan, akta kelahiran, akta kematian, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya.

2. Kelompok pelayanan barang. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang dapat digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

3. Kelompok pelayanan jasa. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jadaai yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi umum, pos dan lain sebagainya.

Dalam undang-ungan No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawasan internal
5. Penyuluhan kepada masyarakat

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan publikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>22</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2008), hlm.27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan,

Sekurang - kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi layanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat, Negara. publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki.

<sup>23</sup> Harbani Pasolong *Teori Administrasi Publik*. (Bandung : Alfabeta 2005), hlm.128

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan umum adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.

Pelayanan sendiri berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, pelayanan merupakan serangkaian kegiatan karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. berpendapat bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat pada umumnya sangat mengharapkan suatu bentuk pelayanan terbaik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Sehingga suatu peningkatan pelayanan yang memiliki kualitas akan sangat diinginkan oleh masyarakat saat ini.<sup>24</sup>

Jadi pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk akan suatu barang, jasa yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik

<sup>24</sup> Poltak Sinambela Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara 2006), hlm.5





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasolog dalam Sinambela (2006:8) mengatakan bahwasannya pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

#### Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya<sup>25</sup>

Transformasi Pelayanan Publik mendefenisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operas kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>26</sup> Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.<sup>27</sup>

Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang diencanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan

<sup>25</sup> Othenk, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.( Literatur book, 2008), hlm. 11

<sup>26</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta : Pembaruan, 2015) hlm. 109

<sup>27</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.(Bandung:Mandar Mas,2009) hlm. 59



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

jumlah personil yang ditentukan.<sup>28</sup> Efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi, pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantapm perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasaran, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.<sup>29</sup>

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dan variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>30</sup>

Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>31</sup> Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi

<sup>28</sup> Effendi, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 27

<sup>29</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. (Jakarta:Gramedia Widia,2015)Hlm.65

<sup>30</sup> Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Bandung:Alfabeta, 2017) Hlm. 88

<sup>31</sup> Tika, Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2014). hlm.129

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.<sup>32</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut Terdapat beberapa aspek efektivitas suatu program, antara lain:

#### a. Aspek Peraturan Dan Ketentuan

Efektivitas pada suatu aktifitas dapat dianggap tercapai dengan melihat fungsi atau tidaknya aturan yang telah di buat dalam menjaga kelangsungan proses aktivitas tersebut. Aturan ini berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta. Apalabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketetapan tersebut telah berjalan dengan efektif.

#### b. Aspek Fungsi Dan Tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apalila menjalankan tugas dan fungsi yang baik. Begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektif apabila fungsi dan tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran para peserta berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

#### c. Aspek Program Atau Rencana

<sup>32</sup> Muhidin, *dkk Analisis Korelasi, Dan Jalur Dalam Penelitian*. (Bandung : Pustaka Setia 2009), hlm. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram dengan baik. Apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.

d. Aspek kondisi ideal atau tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program diraih dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efektivitas terdiri dari:<sup>33</sup>

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

<sup>33</sup> Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012) hlm. 77



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karna dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengadilan yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut sistem pengawasan dan pengendalian.

#### Kerangka Berpikir

Hasil penelitian efektivitas penerapan online single submission (oss) pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenga kerja di kabupaten kepulauan meranti maka penulis merumuskan kerangka berpikir dengan fenomena dan konsep teori.

#### D. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABLE

III.1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, serta hambatan hambatan dalam efektivitas Penerapan Online Single Submissin (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta sasaran bagi pihak yang berkepentingan dan berkaitan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPDTK) Kabupaten kepulauan meranti.

1. Dengan adanya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten kepulauan meranti, masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan dalam satu tempat saja. Namun sejalan dengan adanya OSS yang diterapkan oleh DPMPTSPDTK Kabupaten Kepulauan Meranti masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan. Masyarakat hanya perlu mengetahui mekanisme pengajuan atau Standar Operasional Prosdedur (SOP) tentang pengurusan izin secara online lalu mereka bisa langsung mengetahui status perizinan yang mereka urus tanpa sering datang ke kantor DPMPTSPDTK untuk mengetahui apakah izin yang mereka urus sudah selesai.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. OSS yang di selenggarakan oleh DPMPTSPDTK Kabupaten Meranti belum efektif.

Hal ini disebabkan beberapa hambatan yang terjadi seperti adanya gangguan jaringan pada saat operasional, ini dapat menghambat efektivitas dari Online Single Submission itu. Karena proses pendataan, verifikasi dan notifikasi membutuhkan jaringan untuk mengakses OSS tersebut. Kedua, kurangnya kemampuan pegawai dalam menerapkan OSS sehingga menghambat proses kerja OSS ini. Ketiga, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat tetap harus datang ke kantor dinas untuk mengetahui penggunaan OSS ini.

#### Saran

Adapun yang dapat diberikan dalam efektivitas Penerapan Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Untuk program OSS yang diterapkan oleh pemerintah maka diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya kendala yang menghambat proses kerja OSS.
2. Untuk hambatan dalam efektivitas OSS pertama dari segi gangguan jaringan. Pemerintah kedepannya diharapkan dapat berkejasama dengan kominfo dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kedua, sumber daya manusia sebagai mentor masyarakat harus mengetahui cara kerja OSS dengan diadakannya pelatihan yang rutin kepada seluruh pegawai front office agar tidak saling Tanya satu sama lain. Pegawai harus mengetahui bidangnya dengan maksimal. Ketiga, untuk kurangnya sosialisasi kepada



masyarakat diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi serta pemahaman penggunaan OSS serta tentang pentingnya aplikasi OSS ini. Ini dapat mempermudah masyarakat dalam hal melakukan pengurusan perizinan tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSPDTK. Sosialisasi dilakukan dengan datang ke tiap desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjelaskan tentang OSS serta penggunaannya. Kemudian dengan membuat spanduk di tiap kantor desa agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui Online Single Submission tersebut.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Nashir Budiman, 2004, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ang Kurniawan, 2015, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran,
- Badudu, J.S dan Sultan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cici Maliha Wulandari, 2019. Efektivitas Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau.
- Daniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Fadhly Usman, 2018. Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Sistem Mobile Elektronik (SIMOLEK) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Universitas Riau
- H.A.S Moenir, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hartono Sunaryati, 1970, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Hartono Sunaryati, 1970, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Hssel Nogi, S.Tangkilisan, 2015, *Manajemen Publik*. Jakarta:Gramedia Widia.
- Harbani Pasolong, 2017, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta,
- Lihar Aminuddin, 2006. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Pt Karisma Utama.
- Marlina, 2018. Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak. Universitas Riau.
- Mulyana N. Asep, 2019. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo.
- Moloed, Raymond, 2008, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyanto Agus, 2009, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhidin, 2009, *dkk Analisis Korelasi, Dan Jalur Dalam Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia.

Mong Uchjana, Effendi, 2013, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Odenk, 2008, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. Literatur book.

Pasolong Harbani, 2005, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Rahmadi Supanca, Ida Bagus, 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Rustan, 2019. *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, Makassar: CV Sah Media.

Raharja Setya, 2006, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: UNY Press

Sondang P. Siagian, 2012, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutanta Edhy, 2003, *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sendjun H Manulang, 1998. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra

sunggono Bambang, 2015. *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju,

Santo Azhar, 2002, *System Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Bandung: Lingga Jaya

Sambela Dkk Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara

Tika, Pabundu. 2014 *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wulan purnama sari dan litya irena, 2019. *Kumunikasi Komputer Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

#### Peraturan undang-undangan:

Pemerintahan Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintahan Indonesia. 2006. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kepulauan meranti Lembaran Ri Tahun 2006 No. 24. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintahan Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Ri Tahun 2009 No. 25. Jakarta : Sekretariat Negara

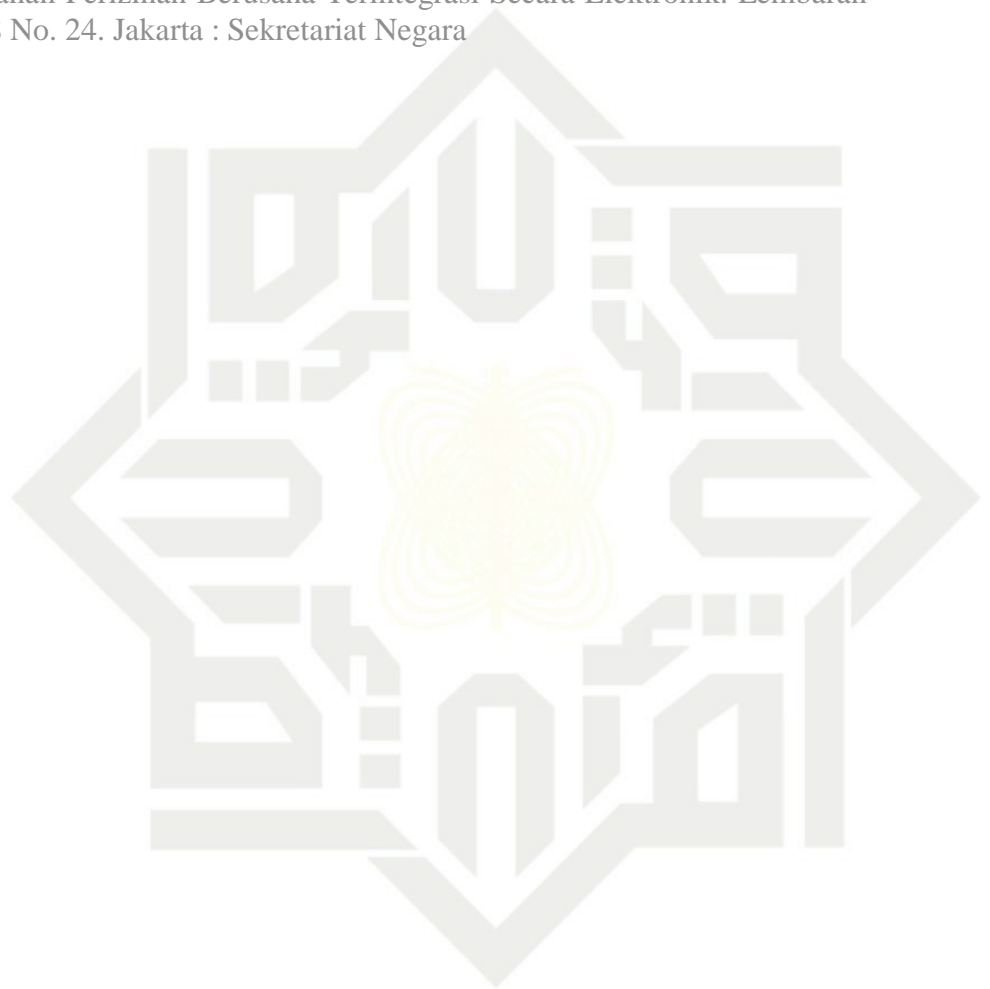
Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Ri Tahun 2018 No. 24. Jakarta : Sekretariat Negara

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email, admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: JUNAIDI

: 11627104266

: Ilmu Hukum

: EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA  
ELEKTRONIK

Pembimbing : H. Mhd. Kastulani, S.H, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2020

Ag. Pimpinan Redaksi



Ag. Ahf Svahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (SS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TERAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Ditulis Oleh Saudara :

Nama : JUNAIDI  
NIM : 11627104266  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Diseminarkan Pada Hari / Tanggal / Tahun : JUMAT, 19 FEBUARI 2021  
Narasumber : RONI KURNIAWAN, MH

Telaah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Febuari 2021.

Kepala St. Bagian Akademik

Narasumber

JALINUS S.A.G.

NIP. 19750801 200701 1 023

RONI KURNIAWAN, MH.

NIK. 130217086

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Telah diperiksa dengan judul *"EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA PENERAPAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK"* yang ditulis oleh :

Nama : JUNAIDI  
NIM : 11627104266  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telah dimunaqasahkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
Firdaus, SH., MH

Setretaris  
Musrifah, SH., MH

Penguji I  
Joni Alizon, SH., M.H

Penguji II  
Syahrinaldi SH., MA

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang F.I/PP.00.9/2394/2021

Pekanbaru, 24 Februari 2021

1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Junaidi
NIM	: 11627104266
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI  
SARANA ELEKTRONIK

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39068  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 ohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**  
**009/2394/2021 Tanggal 24 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

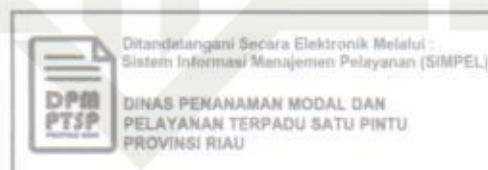
1. Nama	: JUNAIDI
2. NIM / KTP	: 11627104266
3. Program Studi -	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
7. Lokasi Penelitian	: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai  
 tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan  
 Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021



**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 053/DPMPTSPTK/III/2021/SKP/15**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39068 Tanggal 25 Februari 2021 dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama :  
 NIM :  
 Program Studi :  
 Jenjang :  
 Alamat :  
 Judul Penelitian :

: Junaidi  
 : 11627104266  
 : Ilmu Hukum  
 : S1  
 : Pekanbaru  
 : Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
 : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Lokasi Penelitian :

: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang  
 Pada tanggal : 15 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**AFRIZAL DHARMA, SE**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19740401 199903 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
 E-mail: dpmptsptkmeranti@gmail.com  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 053/DPMPTSPTK/III/2021/053

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan dengan ini selanjutnya bahwa :

Nama	: JUNAIDI
N I M	: 11627104266
Alamat	: Pekanbaru
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Perguruan Tinggi	: UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: Efektivitas Penerapan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat pengantar ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Selatpanjang, 19 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**AFRIZAL DHARMA, SE**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19740401 199903 1 009





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Junaidi Lahir Selatpanjang, 22 Januari 1998 Yang Merupakan Anak Pertama Dari 3 Bersaudara Yang Di Lahirkan Pasangan Bapak MOHD. Ali Ahmad Dan Ibuk Nurhayati Dan Memupayai Saudara Laki Laki Yang Bernama Sulaiman Dan Mempunyai Saudara Perempuan Yang Bernama Junaida.

Pendidikan Yang Di Tempuh Oleh Penulis Dari, SD Negeri 3 Selatpanjang (2004-2010), MTS.N Selatpanjang (2011-2013), SMA.N.1 Tebing Tinggi (2014-2016). Selanjutnya Melanjutkan Perguruan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Di Fakultas Syariah Dan Hukum Mengambil Prodi S1 Ilmu Hukum. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (Pkl) Di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Selama 1 Bulan 15 Hari, Yaitu Pada Bulan Maret Sampai Dengan Bulan Juni 2019. Untuk Menyelesaikan Pendidikan Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Maka Penulis Mengajukan Tugas Akhir Dengan Judul: **“efektivitas penerapan online single submission (oss) pada proses penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja di kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik”**